**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 138 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2024**

Oleh: Winndy Masyka Putra

Pembimbing : Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.IP.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The rapid growth of Pekanbaru City has led to illegal parking problems that have an impact on the smooth flow of traffic, security, and city order. Although the Transportation Agency through UPT Perpustakaan has conducted patrols and enforcement, parking violations still occur frequently. The main problem lies in the lack of public awareness, weak policy socialization, limited human resources, and not optimal supervision. This research aims to analyze the implementation of Mayor Regulation Number 138 of 2020 concerning the Implementation of Parking in Pekanbaru City, especially on the implementation on Jalan HR. Soebrantas, and identify inhibiting factors in its implementation. This research uses the theory of public policy implementation by referring to the George C. Edwards III model, which highlights four main variables: communication, resources, disposition (executor attitude), and bureaucratic structure. The success of policy implementation is strongly influenced by clarity of communication, adequacy of resources, commitment of implementers, and a supportive organizational structure. The research method used is descriptive qualitative. Data were collected through interviews, observations, and documentation of informants from the Transportation Agency, UPT Perpustakaan, parking officers, and the public who use parking services on Jalan HR. Soebrantas. Data analysis was carried out by reducing, presenting, and drawing conclusions from the data obtained. The results showed that the implementation of Mayor Regulation Number 138 of 2020 still faces various obstacles. Communication and socialization of policies are not optimal so that people do not understand parking rules. Human resources, both in terms of number and competence of officers, are still limited. Supervision of parking implementation is also not optimal, so illegal parking violations still occur frequently. Increased socialization, officer training, and stricter supervision are needed so that the parking system in Pekanbaru City can run effectively and accountably.

Keywords: Implementation, Monitoring, Parking, Illegal parking

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diatur dalam beberapa pasal penting. Dalam Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya, Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan, sesuai dengan izin yang diberikan. Pasal 118 ayat 2 juga menegaskan bahwa terdapat lokasi-lokasi tertentu yang dilarang untuk parkir karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, mengalami pertumbuhan pesat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Pertumbuhan ini berdampak positif terhadap pembangunan kota, tetapi juga menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah parkir ilegal. Parkir ilegal menjadi isu serius yang mengganggu kelancaran lalu lintas, mengancam keselamatan pengguna jalan, dan menurunkan kualitas tata ruang kota secara keseluruhan.

Secara umum, parkir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu parkir legal dan parkir ilegal. Parkir legal dikelola oleh Dinas Perhubungan dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP), sedangkan parkir ilegal biasanya dikelola oleh pihak yang tidak berwenang. Juru parkir legal diwajibkan mengenakan atribut

resmi seperti baju parkir, karcis, dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengelola perparkiran melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dengan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem ini merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan layanan publik. Dengan konsep BLUD, pengelolaan parkir diharapkan lebih efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 mengatur syarat parkir di ruang milik jalan atau tepi jalan. Beberapa syarat utama antara lain adalah lokasi parkir harus ditandai dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan, memiliki minimal dua lajur per arah, menjamin keselamatan lalu lintas, mudah dijangkau, dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan parkir tidak mengganggu arus lalu lintas dan tetap ramah terhadap lingkungan serta pengguna jalan lainnya.

Peraturan tersebut juga melarang penggunaan fasilitas publik seperti trotoar dan jalur sepeda sebagai tempat parkir. Larangan ini ditegaskan dalam Pasal 9 huruf e serta Pasal 10 huruf b dan c. Tujuannya adalah melindungi hak pejalan kaki dan menjaga fungsi fasilitas umum tetap optimal. Dengan demikian, regulasi ini berperan penting dalam

menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang publik Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan parkir merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 6. Wewenang penetapan lokasi parkir di ruang milik jalan berada di tangan Walikota melalui forum lalu lintas. Pengaturan ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 118 ayat 2. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan ruang jalan dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru memiliki tugas mengawasi ketertiban parkir dan menindak pelanggaran seperti parkir ilegal. UPTD juga bertugas mengatur perizinan, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan menyiapkan lokasi-lokasi baru untuk parkir. Di sisi lain, pengawasan terhadap juru parkir juga menjadi bagian dari tugas mereka, termasuk menindak juru parkir ilegal dan memastikan atribut kelengkapan mereka sesuai dengan ketentuan.

Parkir ilegal menimbulkan banyak masalah, termasuk kemacetan, terganggunya akses darurat, dan potensi kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang diparkir sembarangan sering kali menutupi pandangan dan mengganggu jalur lalu lintas serta trotoar. Hal ini membuat masyarakat, khususnya pejalan kaki dan pengguna kendaraan darurat, berada dalam situasi berbahaya dan tidak nyaman.

Dinas Perhubungan secara rutin melakukan patroli untuk menertibkan juru parkir ilegal. Contohnya, pada Agustus 2024, UPT

Perparkiran menangkap tiga juru parkir ilegal di sekitar Halte Bus TMP dekat SKA Mall. Mereka diberi peringatan dan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Patroli serupa dilakukan di sekitar RSUD Arifin Ahmad dan pusat perbelanjaan, dengan mengerahkan 30 personel dari pagi hingga malam.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, parkir ilegal masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan menjadi hambatan utama. Diperlukan pendekatan yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 yang mencakup teguran, denda administratif hingga Rp1 juta, dan pengembalian seluruh pendapatan parkir ilegal.

Jalan H.R. Soebrantas dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu jalan utama di Pekanbaru dengan tingkat lalu lintas yang tinggi dan aktivitas yang padat. Lokasinya yang berada di pinggiran kota menyebabkan pengawasan terhadap parkir sering kali tidak optimal. Bentang jalan yang panjang dan tingginya volume kendaraan membuat kawasan ini rentan terhadap pelanggaran parkir. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan parkir di wilayah ini sebagai upaya perbaikan tata kelola transportasi kota.

B. Kerangka Teori

- Implementasi kebijakan tahap yang sangat penting dalam kebijakan publik adalah penerapan

kebijakan. Implementasi biasanya dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan program atau kebijakan.

Grindle (Mustari, 2015) berpendapat bahwa tugas implementasi yaitu membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Pada hakikatnya, menurut Van Meter dan Van Horn (Mustari, 2015) menyatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa

yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure

(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Abdoellah, 2016).

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya.

Setelah data diperoleh kemudian disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti, yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru.

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya yang diteliti ialah Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Alasan menetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Jalan HR. Soebrantas Oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

1.1 Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam implementasi peraturan ini. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang jelas mengenai ketentuan baru, termasuk tata cara perparkiran dan tarif yang berlaku. Misalnya, penggunaan berbagai media komunikasi seperti poster, rapat koordinasi, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, komunikasi dua arah antara petugas parkir dan pengguna parkir juga perlu diperkuat untuk mengatasi masalah yang muncul di lapangan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan perparkiran dengan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam Pasal 48, dinyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan dorongan kepada pihak ketiga yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan layanan parkir agar menggunakan sistem teknologi informasi yang dapat terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan parkir, serta memastikan bahwa informasi terkait layanan parkir dapat dikelola dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya,

Pasal 49 menjelaskan bahwa teknologi informasi yang dimaksud harus mampu menyediakan informasi tentang layanan parkir yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya kemudahan akses ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan mengenai lokasi, tarif, dan ketersediaan tempat parkir secara real-time. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan perparkiran, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi terkait layanan publik.

Dengan berdasarkan pasal tersebut upt-parkir yang mana di maksud dalam pasal 48 sebagai pihak ketiga telah menjalankan pemberian layanan informasi kepada Masyarakat, yang di benarkan oleh Bapak Radinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPT dalam wawancara pada 17 desember yang mengatkan bahwa:

“pihak kami sudah memberikan informasi melalu media cetak, media online dan sosial media, karna hal ini di anggap lebih cepat dan efisien. juga kami membuat layanan pengaduan melalui social media dan whatsapps dengan format yang ada”.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan strategi komunikasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan berbagai platform, informasi dapat disampaikan secara luas dan tepat sasaran. Berikut penjelasan terkait pendekatan ini: Penggunaan media cetak seperti koran atau pamflet, serta media online dan

sosial media, memberikan cakupan komunikasi yang lebih luas. Media cetak menjangkau audiens tradisional, sedangkan media online dan sosial media lebih efektif untuk generasi digital. Strategi ini dinilai efisien karena informasi dapat disebarkan dengan cepat dan menjangkau banyak orang sekaligus.

Membuka jalur komunikasi melalui sosial media dan WhatsApp mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung. Format pengaduan yang jelas membantu menyaring informasi penting dan mempermudah tindak lanjut. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen pihak pengawas dalam memberikan layanan responsif dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

Strategi ini, jika dijalankan dengan baik, strategi komunikasi yang beragam dan adaptif ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih diperhatikan dan memiliki saluran untuk menyuarakan pendapat serta keluhan mereka. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama.

Namun dari hasil wawancara dengan Masyarakat pada tangga 28 desember 2024 sebagai berikut:

“untuk program yang di jalankan oleh dinas perhubungan saya

tidak mengetahui, apalagi tentang peraturan walikota tersebut, yang saya tau Cuma terkait masalah kenaikan tarif parkir saja, itu juga melalui plank parkir yang ada”

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa responden hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang program dan peraturan dari Dinas Perhubungan, khususnya terkait kenaikan tarif parkir yang mereka ketahui lewat papan informasi di lokasi parkir. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif dari pihak dinas menyebabkan masyarakat tidak memahami kebijakan dan implikasi peraturan yang berlaku, sehingga partisipasi warga dalam mendukung kebijakan menjadi terhambat dan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan parkir di daerah tersebut.

1.2 Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; dan berbagai fasilitas di dalamnya untuk kepentingan penyelenggaraan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan tersebut menjadi standar nasional dalam mengelola parkir. Pada Pasal 43 ayat 3 berbunyi:

“Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan

dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.”

Sehubungan dengan itu, dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Pasal 14 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan. Ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir yang sesuai dengan standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir dengan rambu, marka, dan media informasi tarif serta waktu, memastikan kendaraan dapat keluar masuk dengan aman dan selamat sambil memprioritaskan kelancaran lalu lintas, serta menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan yang diparkir. Sementara itu, ayat 2 mengatur bahwa penyelenggara parkir di halaman toko atau tempat usaha lainnya juga dianggap sebagai penyelenggara parkir di ruang milik jalan jika tidak ada pembatas pagar dengan jalan, tidak ada pintu masuk khusus untuk pemungutan tarif parkir, dan tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih teratur dan aman di Kota Pekanbaru.

Terkait sumber daya material, dalam wawancara pada 17 Desember dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP selaku Kepala UPT. Perparkiran mengatakan bahwa *“kami memiliki kendaraan patrol, rambu portable dan mobil derek dalam mengawasi perparkiran”* Dari hasil wawancara ini, dalam konteks pengawasan perparkiran, kendaraan patroli, rambu portabel, dan mobil derek merupakan bentuk

konkret dari sumber daya material yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Ketiga elemen ini berfungsi sebagai sarana operasional yang membantu pelaksana kebijakan menjalankan tugas mereka dengan efisien.

Kendaraan patroli berfungsi untuk memastikan pelaksana dapat bergerak cepat dan fleksibel dalam memantau area perparkiran. Kendaraan ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pelanggaran atau situasi darurat di lapangan. Rambu portabel digunakan untuk memberikan informasi atau peringatan kepada pengguna jalan dan parkir.

Keberadaan rambu ini sangat membantu dalam mengarahkan perilaku pengguna parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, mobil derek merupakan alat penting untuk menegakkan kebijakan, terutama dalam menangani pelanggaran seperti parkir sembarangan. Mobil derek memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan ketersediaan ruang parkir yang lebih tertib. Ketiga sumber daya material ini, jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perparkiran. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan di sektor ini dapat berjalan lebih optimal, menciptakan keteraturan, dan mendukung kelancaran lalu lintas.

Pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Pasal 45 poin a, menekankan pentingnya ketersediaan petugas parkir yang tidak hanya memadai dari segi jumlah, tetapi juga

memiliki kompetensi dan pelatihan yang memadai. Struktur petugas parkir di Kota Pekanbaru terdiri dari dua tingkatan utama, yaitu Koordinator Juru Parkir dan Juru Parkir. Koordinator Juru Parkir berperan penting dalam mengatur dan mengawasi para juru parkir, memastikan standar pelayanan terpenuhi, serta menjadi penghubung antara petugas di lapangan dengan pihak manajemen atau UPT Parkir. Sementara itu, Juru Parkir bertugas langsung membantu pengendara, menjaga ketertiban dan keamanan area parkir, serta memastikan kendaraan ditempatkan dengan benar. Mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan publik di sektor perparkiran.

Zona 2 parkir yang mencakup Jalan H.R. Soebrantas memiliki sekitar 150 juru parkir yang bertugas mengatur aktivitas parkir di kawasan tersebut. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan pengelolaan parkir di wilayah yang padat kendaraan tersebut. Meski demikian, tingginya jumlah petugas juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam koordinasi dan pengawasan. Untuk itu, sistem manajemen yang efektif serta komunikasi yang baik antarpetugas sangat diperlukan. Pembinaan dan pelatihan secara berkala menjadi kunci agar setiap petugas memahami dan menjalankan tugasnya secara profesional serta disiplin.

UPT Parkir telah melakukan pendataan terhadap seluruh petugas dan pengelola parkir di tiap zona untuk memastikan mereka terdaftar resmi dan mendapatkan pembinaan. Pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020

juga mengatur evaluasi kinerja petugas parkir secara berkala, dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan sanksi, termasuk pemutusan hubungan kerja jika ditemukan pelanggaran. Dalam wawancara pada tanggal 17 Desember, Bapak Radinal Munandar, S.STP, selaku Kepala UPT Perparkiran, menegaskan komitmen tersebut: *“Dalam pelaksanaan perparkiran kita terus melakukan pengawasan dan evaluasi setiap hari kepada petugas parkir.”* Namun demikian, wawancara tanggal 28 Desember 2024 dengan Pak Putra, seorang petugas parkir di Jalan HR. Soebrantas, mengungkapkan realitas berbeda: *“Untuk pembinaan dan bekal itu saya pernah hadir, tapi untuk pengawasan di Jalan HR. Subrantas ini sangat jarang sekali, bahkan sebulan sekali itu sangat jarang.”*

Ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya pengawasan dapat menurunkan semangat kerja petugas, dan memperbesar potensi pelanggaran. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat, yang bisa mengalami layanan parkir yang kurang optimal, seperti biaya yang tidak transparan atau penempatan kendaraan yang sembarangan. Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu menambah jumlah petugas pengawas dan memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan sistem pemantauan digital agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan real-time. Upaya tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kondisi lapangan juga diungkapkan dalam wawancara pada tanggal 2 Februari 2025 dengan seorang pengguna parkir di Jalan HR. Soebrantas: *“Beberapa petugas parkir sangat membantu, tetapi ada juga yang hanya meminta uang tanpa mengatur kendaraan dengan baik.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku di antara petugas parkir. Sebagian bersikap profesional dan membantu, namun sebagian lainnya hanya berfokus pada pungutan tanpa memberikan pelayanan yang memadai. Dualitas ini menciptakan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir resmi. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan dan pengawasan harus terus dilakukan agar pelayanan parkir menjadi lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

1.3 Disposisi

Disposisi merujuk pada dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan program kerja yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk nyata dari disposisi ini tercermin dalam gaya kepemimpinan Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar, S.STP. Dalam wawancara pada 17 Desember 2024, beliau menyampaikan:

“Untuk meningkatkan semangat itu setiap minggu saya selalu memberikan motivasi dan memberikan hadiah, dan jika masih tidak melaksanakan tugasnya saya akan berikan sanksi. Dengan diberikannya hadiah dan sanksi itu, saya harapkan mereka terus

semangat dan melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan prosedur.”

Pernyataan tersebut mencerminkan strategi kepemimpinan yang menekankan keseimbangan antara motivasi positif dan penegakan disiplin. Pendekatan seperti ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang produktif, namun tetap berada dalam koridor aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Motivasi diberikan agar pegawai merasa dihargai dan terus terdorong untuk memberikan kinerja terbaiknya, sementara sanksi diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab dan tata tertib kerja.

Pemberian motivasi yang bersifat rutin, baik melalui pengarahan langsung maupun insentif, menunjukkan adanya perhatian pimpinan terhadap kondisi psikologis dan semangat kerja para pegawai. Hal ini dapat menumbuhkan rasa dihargai dan meningkatkan loyalitas, sehingga para pegawai lebih bersemangat dan terdorong untuk bekerja secara optimal. Bentuk penghargaan yang diberikan pun tidak selalu bersifat materi, melainkan bisa berupa pengakuan atas kinerja atau pencapaian tertentu yang dianggap baik.

Di sisi lain, penerapan sanksi kepada pegawai yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan juga merupakan langkah penting dalam menjaga kedisiplinan dan profesionalitas kerja. Konsistensi dalam penegakan aturan akan menciptakan kejelasan tentang batasan perilaku yang dapat diterima dalam organisasi. Dengan demikian, para pegawai akan lebih memahami pentingnya bekerja sesuai prosedur

dan dapat menghindari perilaku yang kontraproduktif terhadap tujuan organisasi.

Kombinasi antara pemberian penghargaan dan sanksi mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang seimbang dan efektif. Strategi ini tidak hanya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kompetitif dan positif, tetapi juga memperkuat budaya disiplin dalam organisasi. Dengan pendekatan tersebut, disposisi pegawai dapat dibentuk secara lebih menyeluruh, yakni tidak hanya melalui dorongan eksternal berupa motivasi, tetapi juga melalui kesadaran internal akan pentingnya tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan kerja.

1.4 Struktur Organisasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi yang baik ditandai dengan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyebaran tanggung jawab. SOP berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan harian, sementara penyebaran tanggung jawab menjamin keterlibatan berbagai unit kerja dalam suatu sistem organisasi. Dalam konteks UPT Perparkiran Kota Pekanbaru, hal ini tercermin dalam pernyataan Kepala UPT Perparkiran, Bapak Radinal Munandar, S.STP dalam wawancara pada 17 Desember 2024 yang mengatakan bahwa: *“Terkait Dengan Sop Kita Telah Memilikinya Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah Di Tetapkan sesuai dengan Peraturan 284 Tahun 2017 Dan Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020.”*

Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 mempertegas kedudukan strategis UPT Perparkiran sebagai Unit Pelaksana Teknis Kelas A di bawah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. UPT ini bertugas mengelola perparkiran di berbagai kawasan strategis kota, serta menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di area parkir. Hal ini termasuk penindakan terhadap pelanggaran, seperti penderekan kendaraan, serta pengawasan dan pungutan retribusi parkir. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 memperluas cakupan pengelolaan fasilitas parkir, termasuk pengaturan tarif, jenis layanan seperti valet dan inap, serta sistem pembayaran modern seperti elektronik, guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, profesionalisme petugas parkir menjadi fokus utama. Peraturan tersebut mengatur tentang pelatihan, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan petugas dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin, bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penegakan hukum juga menjadi aspek penting, seperti yang diatur dalam pasal-pasal terkait penindakan terhadap parkir liar dan pelanggaran aturan parkir oleh masyarakat, termasuk tindakan seperti teguran, pengempesan ban, hingga penderekan.

Sejalan dengan upaya itu, UPT Perparkiran melakukan penyebaran tanggung jawab melalui pembentukan tim kerja dengan sistem pengawasan

terjadwal. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Radinal Munandar, S.STP dalam wawancara pada 17 Desember 2024: *"kita telah membentuk 3 regu dengan 16 anggota dan 1 pengawas yang akan mengawasi, dengan 2 shift kerja setiap harinya dengan sistem pershift kerja akan mendapatkan dua hari kerja dan satu hari libur, guna untuk memaksimalkan pengawasan perparkiran setiap harinya."* Pembentukan regu dan sistem shift ini memungkinkan pengawasan berjalan secara optimal sepanjang hari, sekaligus menjaga keseimbangan antara kinerja dan waktu istirahat petugas.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara pada 2 Februari 2025 dengan masyarakat pengguna parkir di Jalan HR. Subrantas, dinyatakan bahwa: *"Banyak kendaraan yang parkir sembarangan tanpa izin, tetapi petugas jarang melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ini."* Pernyataan ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penegakan aturan yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan perparkiran. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi dan pembagian tugas, peningkatan kualitas pengawasan dan ketegasan tindakan di lapangan perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Upt Perparkiran Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Parkir

2.1 Komunikasi

Strategi UPT Perparkiran diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyebaran informasi dan membangun hubungan yang lebih erat serta transparan dengan masyarakat. Namun, kenyataannya belum sejalan dengan harapan tersebut. Dalam wawancara pada 28 Desember 2024 bersama Pak Putra selaku petugas parkir di Jalan HR. Subrantas, beliau menyatakan: *“untuk komunikasi dari pihak upt perparkiran kami jarang mendapatkannya apalagi saya jarang menggunakan media sosial.”* Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak UPTD Perparkiran dan petugas parkir masih minim, terutama bagi individu yang tidak aktif di media sosial. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Rendahnya efektivitas penyebaran informasi juga diperkuat oleh hasil wawancara lainnya pada tanggal yang sama, 28 Desember 2024, dengan salah satu masyarakat pengguna parkir yang menyampaikan: *“saya tidak mengetahui adanya media sosial dari pihak dinas perhubungan(UPT parkir).”* Meskipun pihak Dinas Perhubungan telah memiliki platform seperti Instagram dan Facebook, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak menyadari keberadaan akun-akun tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya strategi komunikasi publik yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakterjangkauan informasi semacam ini memperlihatkan pentingnya penguatan peran media relations dan peningkatan

keterlibatan masyarakat dalam menerima informasi layanan publik.

Selanjutnya, kurangnya informasi yang jelas mengenai fasilitas parkir resmi juga menjadi sorotan penting dalam wawancara pada 2 Februari 2025 dengan pengguna parkir di Jalan HR. Subrantas, yang menyatakan: *“Saya tidak tahu di mana lokasi parkir yang resmi karena tidak ada informasi yang jelas di media sosial dan yang saya ketahui hanya yang memang di pasang rambunya saja.”* Temuan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai lokasi parkir resmi tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam konteks modern saat ini, pemanfaatan media digital seperti media sosial dan aplikasi mobile seharusnya menjadi alat strategis untuk menyebarkan informasi yang akurat dan cepat. Kurangnya pemanfaatan ini menyebabkan pengguna kesulitan membedakan parkir resmi dan tidak resmi, yang akhirnya berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Jika strategi komunikasi yang disusun oleh UPT Perparkiran dijalankan dengan baik, seharusnya dapat mengatasi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat hingga kesalahan dalam praktik parkir. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, terlihat bahwa penyampaian informasi oleh pihak UPT Perparkiran masih sangat terbatas. Komunikasi satu arah melalui media sosial belum cukup efektif, terutama karena tidak semua masyarakat atau petugas aktif di platform tersebut. Oleh karena itu, perlu pendekatan komunikasi yang

lebih menyeluruh, seperti penyuluhan langsung, penggunaan media cetak lokal, atau pemanfaatan radio sebagai alternatif saluran informasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merangkum beberapa faktor penghambat komunikasi yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kurangnya pengawasan dan minimnya peran Humas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kedua, komunikasi antara Dinas Perhubungan dan para juru parkir perlu ditingkatkan agar pesan-pesan penting tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Ketiga, meskipun sudah ada upaya penggunaan berbagai media, strategi yang diterapkan masih belum optimal karena kurangnya interaksi langsung antara instansi dan masyarakat. Interaksi dua arah sangat penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa informasi benar-benar dipahami dan diterima oleh publik secara menyeluruh.

2.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi kendala signifikan dalam pengimplementasian peraturan parkir, khususnya dalam hal pengawasan di wilayah yang luas. Contohnya dapat dilihat di Jalan HR. Subrantas yang letaknya cukup jauh dari kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir. Jarak yang jauh ini menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan secara optimal, yang berujung pada banyaknya pelanggaran parkir yang luput dari pantauan. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir menurun dan efektivitas sistem retribusi pun turut terdampak. Untuk

mengatasi masalah ini, diperlukan penambahan personel dan dukungan teknologi seperti kamera pemantau atau aplikasi mobile, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan menjangkau area yang lebih luas.

Permasalahan lain muncul dari perilaku petugas parkir itu sendiri. Sebagaimana dalam wawancara pada 2 Februari 2025 dengan salah satu pengguna parkir di Jalan HR. Subrantas yang menyampaikan: *"Beberapa petugas parkir sangat membantu, tetapi ada juga yang hanya meminta uang tanpa mengatur kendaraan dengan baik."* Wawancara ini menunjukkan adanya dualitas dalam perilaku petugas, di mana sebagian menjalankan tugas dengan baik, sementara yang lain justru tidak menjalankan tanggung jawab mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan merusak citra petugas parkir resmi. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta evaluasi rutin terhadap kinerja petugas untuk memastikan profesionalisme dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat.

Masalah tidak berhenti pada kurangnya pengawasan atau perilaku petugas, tetapi juga pada ketersediaan lahan parkir yang memadai. Dalam wawancara lain pada tanggal yang sama, 2 Februari 2025, seorang pengguna menyatakan: *"Tempat parkir sering penuh, sehingga saya terpaksa parkir di tempat yang tidak seharusnya."* Keluhan ini menggambarkan realitas yang sering dihadapi oleh pengguna kendaraan di kawasan padat. Ketidacukupan kapasitas parkir mendorong praktik parkir liar yang mengganggu ketertiban dan memperparah

kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, solusi seperti pembangunan fasilitas parkir vertikal atau basement menjadi penting, serta penerapan sistem parkir berbayar yang disesuaikan untuk mengelola permintaan parkir secara lebih efisien.

Tuntutan masyarakat terhadap perbaikan fasilitas parkir semakin jelas sebagaimana ditunjukkan dalam wawancara lain pada 2 Februari 2025 yang berbunyi: *"Saya berharap ada lebih banyak fasilitas parkir, terutama di sekitar pusat perbelanjaan dan pasar."* Harapan ini mencerminkan kebutuhan yang nyata akan infrastruktur parkir yang lebih memadai, khususnya di kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas parkir yang tersedia menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran parkir dan kesemrawutan di kawasan komersial. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan lebih serius mengimplementasikan Peraturan Wali Kota No. 138 Tahun 2020 terkait penyediaan fasilitas parkir, terutama di area publik yang vital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa kendala utama dalam pengelolaan parkir di Pekanbaru mencakup keterbatasan sumber daya manusia, perilaku petugas parkir, serta kekurangan fasilitas parkir yang memadai. Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kualitas SDM, hingga

pengembangan infrastruktur parkir yang memadai. Dengan langkah strategis tersebut, pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.3 Disposisi

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan adanya indikasi bahwa disposisi dari pihak UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan perparkiran di sepanjang Jalan HR Soebrantas belum optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya petugas parkir ilegal di kawasan tersebut, meskipun Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 telah secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran. Kurangnya pengawasan ini berdampak langsung pada ketidaktertiban lalu lintas, menurunnya kenyamanan pengguna jalan, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, khususnya bagi para pedagang resmi yang terganggu oleh praktik parkir liar.

Masalah ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu petugas parkir yang diwawancarai pada 2 Februari 2025, yang menyampaikan: *"Kami sering tidak tahu area mana yang harus kami awasi. Ini membuat beberapa area tidak terjangkau atau terlewatkan."* Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan dalam sistem pembagian tugas dan tanggung jawab pengawasan di lapangan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tidak terarah dan berpotensi tumpang tindih, yang pada akhirnya membuat

pengawasan terhadap pelanggaran parkir menjadi tidak efektif.

Implikasi dari lemahnya pembagian tugas ini adalah tidak meratanya cakupan pengawasan, terutama di kawasan dengan kepadatan kendaraan tinggi seperti Jalan HR Soebrantas. Area yang semestinya menjadi prioritas pengawasan justru sering kali terabaikan karena petugas tidak memiliki panduan kerja yang sistematis. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran parkir tanpa adanya tindakan preventif atau penegakan hukum yang memadai, sehingga memperparah permasalahan yang ada.

Selain pembagian tugas yang tidak jelas, faktor geografis juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan. Lokasi Jalan HR Soebrantas yang cukup jauh dari kantor UPT Perparkiran menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan patroli rutin. Petugas membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai lokasi, sehingga frekuensi pengawasan menurun dan pelanggaran seringkali tidak terdeteksi. Kurangnya kehadiran petugas di lapangan secara konsisten turut menurunkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan parkir, yang kemudian memperburuk situasi.

Kondisi tersebut berkontribusi pada semakin buruknya ketertiban di Jalan HR Soebrantas. Pelanggaran parkir yang tidak ditindak dengan tegas menyebabkan masyarakat semakin abai terhadap aturan, menciptakan siklus ketidaksiplinan yang sulit diputus. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas kebijakan perparkiran, tetapi juga memperburuk

citra pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik. Dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan oleh Tachjan (2006), keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh pemahaman dan komitmen para pelaksananya. Artinya, tanpa adanya pemahaman menyeluruh serta komitmen yang tinggi dari petugas, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan secara maksimal.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan perparkiran di Jalan HR Soebrantas memerlukan langkah-langkah strategis dan terstruktur. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi evaluasi pembagian tugas petugas parkir secara menyeluruh, penyusunan dan distribusi standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan koordinasi antarregu, serta penambahan sumber daya manusia dan sarana transportasi untuk mendukung patroli yang lebih rutin dan efisien. Dengan reformasi internal yang terarah dan dukungan operasional yang memadai, diharapkan sistem pengawasan perparkiran dapat menjadi lebih efektif, dan pada akhirnya menciptakan kondisi parkir yang tertib, aman, serta nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

2.4 Struktur organisasi

Hasil wawancara dengan petugas parkir pada tanggal 2 Februari 2025 di Kota Pekanbaru mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu petugas menyatakan:

“SOP yang ada tidak pernah disosialisasikan dengan baik. Kami hanya tahu tugas dari pengalaman, bukan dari dokumen resmi, dan untuk pengawasan di sekitaran Jalan Subrantas ini saya lihat sangat jarang sekali.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan operasional di lapangan, khususnya dalam hal sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang semestinya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas ternyata belum tersampaikan dengan baik kepada para pelaksana. Akibatnya, para petugas lebih mengandalkan pengalaman pribadi dibandingkan pedoman resmi dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap yang nyata antara kebijakan formal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pelaksanaannya di lapangan.

Selain itu, pernyataan petugas juga menyoroti lemahnya intensitas pengawasan oleh pihak berwenang di sekitar Jalan HR. Soebrantas. Kurangnya pengawasan tersebut membuat petugas merasa tidak mendapatkan dukungan serta arahan yang memadai dari atasan, sehingga menurunkan motivasi dan disiplin dalam pelaksanaan tugas. Hal ini turut memperburuk kondisi di lapangan, karena tanpa pengawasan yang konsisten, potensi terjadinya pelanggaran dan parkir liar menjadi semakin tinggi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, struktur organisasi di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru juga menunjukkan indikasi kurang optimal dalam mendukung pengawasan

perparkiran yang efektif. Pembagian tugas antar regu pengawas terkesan tidak jelas dan belum terorganisasi secara sistematis. Beberapa wilayah mengalami tumpang tindih pengawasan, sementara wilayah lainnya justru tidak terjangkau sama sekali. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar regu memperparah situasi, karena instruksi dan informasi dari atasan seringkali tidak tersampaikan secara merata.

Permasalahan semakin kompleks karena tidak adanya SOP yang rinci dan terdistribusi dengan baik mengenai pembagian area tanggung jawab dan target pengawasan. Petugas parkir tidak memiliki acuan kerja yang pasti, sehingga pelaksanaan tugas menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dievaluasi secara objektif. Ketidaktahuan terhadap pembagian wilayah juga berdampak pada kesulitan dalam menentukan akuntabilitas serta dalam melakukan evaluasi kinerja setiap regu.

Akibat dari lemahnya struktur organisasi dan tidak jelasnya pembagian tugas, pengawasan terhadap praktik parkir ilegal menjadi kurang efektif. Hal ini sangat terlihat di kawasan padat kendaraan seperti Jalan HR. Soebrantas, di mana parkir liar masih marak terjadi. Kurangnya pengawasan yang intensif menyebabkan masyarakat tidak memiliki rasa takut terhadap sanksi, sehingga kepatuhan terhadap aturan parkir menjadi rendah. Imbasnya adalah terganggunya kelancaran lalu lintas dan meningkatnya ketidaknyamanan bagi pengguna jalan serta masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan oleh Tachjan (2006), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pemahaman, sikap, dan komitmen para pelaksana di lapangan. Tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga petugas operasional, maka kebijakan yang baik pun sulit untuk dijalankan secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan perpustakaan di Kota Pekanbaru. Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah: menyusun dan menyosialisasikan SOP secara komprehensif kepada seluruh petugas, menetapkan pembagian tugas yang jelas dan merata, meningkatkan koordinasi serta komunikasi antarregu pengawas, dan memberikan pelatihan serta pembinaan secara berkala. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih tertata dan dukungan yang solid dari seluruh pihak, diharapkan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih tertib, aman, dan profesional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal komunikasi, sumber daya, dan disposisi. komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Meskipun pihak UPT Perpustakaan telah berusaha menyampaikan informasi melalui

berbagai media, masih terdapat kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat mengenai kebijakan dan program yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih baik agar masyarakat dapat memahami peraturan dengan lebih baik.

Sumber daya yang tersedia juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Meskipun UPT Perpustakaan memiliki fasilitas seperti kendaraan patroli dan rambu portabel untuk mendukung pengawasan, keberadaan petugas parkir yang terlatih dan kompeten sangat penting untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Evaluasi kinerja secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa petugas parkir memenuhi standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, disposisi atau sikap petugas parkir merupakan aspek penting dalam keberhasilan implementasi peraturan ini. Pendekatan kepemimpinan yang seimbang, dengan memadukan motivasi positif dan penegakan disiplin, dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pemberian penghargaan bagi kinerja yang baik serta penerapan sanksi bagi pelanggaran dapat mendorong petugas untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada upaya dari pihak UPT Perpustakaan untuk melakukan evaluasi harian, kenyataannya pengawasan di lapangan tidak sefrekuentif yang diharapkan.

Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan parkir.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan dalam komunikasi, pengelolaan sumber daya manusia dan material, serta pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin lebih baik melalui pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Penting bagi Dinas Perhubungan dan UPT Perpustakaan untuk meningkatkan strategi komunikasi kepada masyarakat. Meskipun sudah ada upaya melalui media cetak, online, dan sosial media, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, sosialisasi secara langsung melalui forum atau kegiatan komunitas perlu diperbanyak agar masyarakat dapat lebih memahami peraturan dan kebijakan yang ada. Dengan cara ini, diharapkan kesalahpahaman dapat diminimalisir

dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan akan meningkat.

Peningkatan pengawasan terhadap kinerja petugas parkir harus menjadi prioritas. Meskipun ada niat baik dari pihak UPT Perpustakaan untuk melakukan evaluasi rutin, kenyataannya pengawasan di lapangan masih kurang frekuensinya. Penambahan jumlah petugas pengawas atau pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau kinerja petugas parkir secara real-time bisa menjadi solusi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kualitas layanan parkir dapat meningkat dan pelanggaran dapat diminimalisir.

Pelatihan dan pembekalan bagi petugas parkir perlu ditingkatkan. Menyediakan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan akan membantu petugas parkir memahami tugas mereka dengan lebih baik serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan. Selain itu, evaluasi kinerja secara berkala harus dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada petugas agar mereka dapat terus memperbaiki diri.

Menciptakan saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Dengan membuka jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung melalui platform digital seperti media sosial atau aplikasi pesan instan, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Pendekatan kepemimpinan yang seimbang antara motivasi positif dan

penegakan disiplin harus diterapkan secara konsisten. Pemberian penghargaan bagi kinerja yang baik serta sanksi bagi pelanggaran akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan disiplin. Dengan demikian, diharapkan anggota tim tetap bersemangat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka, sehingga penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru dapat berlangsung dengan lebih baik.

Selain itu, penting untuk mengadakan forum atau survei guna mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai pengalaman mereka dengan sistem parkir. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dan strategi sosialisasi yang ada. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat, pengusaha lokal, dan lembaga pendidikan juga disarankan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir. Terakhir, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap efektivitas pelatihan dan kampanye sosialisasi untuk mengevaluasi dampaknya serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan komunikasi antara petugas parkir dan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoellah, Awan Y. & Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adlin. (2013). *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*, Pekanbaru:Alaf Riau.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, Ni'matul. (2021). *Desentralisasi Secara Umum dan Desentralisasi Secara Asimetris*. Bandung: Nusa Media.
- John, C. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.)*. Pustaka Pelajar.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In edisi 4 (Ed.), News.Ge.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta
- Parson, Wayne & Edward Elgar, (2006). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Jakarta Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jurnal

- Anggara, H. D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pekalongan. *PERSPEKTIF*, 11(2), 625–631. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6033>
- Ariska Tri Viky Andani. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota Malang
- Citra Larasati, D., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). 1, 45–60. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Fuaidah, T. (2011). *Metode Penelitian Triangulasi* (cetakan ke). Pusat Belajar.
- Haeruddin. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sultra Journal of Political Science*.
- Maimun Afrizal, Usman Bustami, S. S. M. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Parkir Ilegal. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* (Vol. 5, Issue 1). www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Moeloeng, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Pradana, A., Chandra, D., Puspitasari, D., Jurusan, L. M., Kewarganegaraan, P., Prodi, H., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2019). *Penanggulangan juru parkir ilegal oleh pemerintah kota Yogyakarta*. <https://nusantara.medcom.id>
- Reza Fajriandi dan Afriva Khaidir. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Soluk No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Prosedur Penempatan Pedagang Pasar Semi Modern.
- Rinanda, R., & Jamal, A. (2017). Parkir ilegal dan dampaknya terhadap biaya sosial dan biaya ekonomi. In *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah* (Vol. 2, issue 4).
- Sugiyono, prof. dr. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta.
- Sunendar, D. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keli). CV Adi Perkasa.

SKRIPSI, JURNAL, ARTIKEL

- Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd)
- Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 138 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran
- Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 132 tahun 2020 tentang standar playanan minimal unit pelaksana teknis perparkiran dinas perhubungan Kota Pekanbaru
- Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah.